

Abstrak

Keuangan negara mempunyai ruang lingkup yang luas, dengan lingkup yang luas tersebut diperlukan pedoman sebagai aturan dalam pengelolaannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara. Di Indonesia, salah satu alat untuk mengelola keuangan yang digunakan adalah berupa aplikasi SAKTI yang merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Penelitian dengan judul “Tinjauan Atas Implementasi Modul Bendahara SAKTI Terhadap Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran KPPN Sumedang Dan KPPN Garut”, memiliki rumusan masalah apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan peraturan, apakah terdapat masalah dan bagaimana solusi atas permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Modul Bendahara SAKTI terhadap penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kedua Bendahara pengeluaran.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara terhadap Bendahara Pengeluaran KPPN Sumedang dan KPPN Garut, serta data sekunder berupa buku pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif membandingkan peraturan dengan pelaksanaan mengenai tata usaha dan Pembukuan Bendahara Pengeluaran berbasis sistem atau manual.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Modul sudah sesuai dan telah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran. Terdapat beberapa kendala berupa masalah jaringan yang menghambat berjalannya SAKTI sehingga menjadi kendala ketika bendahara pengeluaran akan melakukan pencatatan transaksi, namun pada akhirnya masalah tersebut bisa diatasi dengan cara membatasi akses aplikasi bagi seluruh satker kecuali oleh KPPN selama jam sibuk berlangsung.

Kata kunci: Keuangan Negara, SAKTI, Bendahara Pengeluaran, Penatausahaan, Laporan Pertanggungjawaban.

Abstract

State finances has a broad scope, with such a broad scope it is required a guideline as a rule in its management as stated in Law Number 17 of 2003 about State Finance. In Indonesia, one of the tools used to manage the finances is the SAKTI application, which stands for “Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi”. The research entitled "Overview of the Implementation of the SAKTI Treasurer Module on Administration and Preparation of the Expenditure Treasurer Accountability Report of KPPN Sumedang and KPPN Garut", formulation of the problems is the implementation in accordance with regulations, whether there are problems and how to solve them. The purpose of this study was to determine the implementation of SAKTI Treasurer Module on the administration and preparation of the Accountability Report of the two expenditure treasurers.

This research uses interview, observation, and literature study methods. The data sources are primary data in the form of interviews with the Expenditure Treasurer of KPPN Sumedang and KPPN Garut, and secondary data in the form of bookkeeping and Accountability Report. The analytical method used is descriptive analysis method comparing regulations with the implementation of administration and Expenditure Treasurer manual or system-based Bookkeeping.

Based on the results, it was concluded that the implementation was in accordance and had been carried out properly by each Expenditure Treasurer. There are several obstacles in the form of network problems that hinder the operational of SAKTI so it becomes a hurdle when the expenditure treasurer record transactions, at the end these problems can be fixed by restricting access for all work units except KPPN during busy hours.

Keywords: State Finance, SAKTI, Expenditure Treasurer, Administration, Accountability Report.